

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS ATAS KEPASTIAN BENTUK BADAN HUKUM BAGI GEREJA- GEREJA DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PEMENUHAN HAK-HAK GEREJA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

**Vica Rianti Ramelan
1787913**

Indonesia merupakan negara yang sangat majemuk dan multikultural, hal ini dikarenakan Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku, bangsa, ras, agama, bahasa, dan adat istiadat, sehingga di Indonesia terdapat keberagaman kebudayaan. Kekayaan kebudayaan inilah yang menyebabkan masyarakat di Indonesia menjadi unik dan berbeda dengan masyarakat lainnya di dunia. Dalam hal keagamaan, kebebasan beragama dijunjung tinggi di Indonesia, yaitu dengan adanya kebebasan beragama yang diatur dalam Konstitusi Negara di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, namun dalam kenyataannya saat ini banyak gereja yang tidak dapat melakukan kegiatan peribadahan .

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori dan undang-undang. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu untuk memberikan gambaran tentang perlindungan hukum terhadap gereja sebagai badan hukum di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual (*conceptual aproach*) dan pendekatan undang-undang (*statute aproach*). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data adalah melalui studi kepustakaan. Teknik analisis terhadap data yang ada adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa badan hukum di Indonesia yang mewadahi gereja adalah badan hukum gereja, perkumpulan, dan yayasan. Saat ini Gereja dapat didirikan dalam bentuk badan hukum perkumpulan atau badan hukum yayasan, karena salah satu maksud dan tujuan pendirian badan-badan hukum tersebut ditujukan untuk kegiatan keagamaan. Gereja sebagai badan hukum merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Gereja memiliki hak untuk menjalankan peribadahan dan untuk melaksanakan peribadahan tersebut gereja membutuhkan tempat yakni gedung gereja. Pemerintah harus melindungi kegiatan keagamaan gereja sebagai subjek hukum dalam hal ini peribadahan, dengan memberikan tindakan yang tegas kepada sekelompok orang yang melanggar hak-hak gereja, sehingga gereja dapat memenuhi hak-haknya.

.Kata Kunci : *Kepastian Bentuk Badan Hukum, Gereja, Pemenuhan Hak*

JURIDICAL REVIEW OF DEFINITENESS OF FORM FOR CHURCH LEGAL ENTITY IN INDONESIA ASSOCIATED WITH THE FULFILLMENT OF THE PRIVILEGES OF THE CHURCH BASED ON THE REGULATION IN INDONESIA

ABSTRACT

Indonesia is a country of compound the multicultural , it was because indonesia consists of various tribe , the people , the race , the religion , the language , observance of the mosaic customs , so that in Indonesia there are variation in culture . There are many culture, causes people in Indonesia to be unique and different from the people in the world. In terms of religious , higher in upheld freedom of religion in Indonesia , it can be proven by freedom of religion arranged in a written constitution in Indonesia that is the constitution of the republic of Indonesia 1945. But this time many churches forbidden to perform the activities of worship because the regulations it has not protect the church as a legal entity.

The methodology used in this research is the normative juridical where the research focus on the written laws of theory. The nature of the rsearch will be analytical descriptive to provide the big picture related to Legal protection against the church as a legal entity in indonesia. The method used in this researcg are conceptual approach and statute approach. Source of data used for analysis is secondary data that obtained through conceptual and literature study. The approach used in this research analysis will be qualitative approach or primarily exploratory research. The objective is to gain a deep understanding or underlying reason and motivations about the case study. Data collection method in this research is done through the literature review and interviews. The data analysis will used a qualitative approach.

The research's result here showed that legal entity in Indonesia which a place for a church are church as a legal entity, association, and foundation. This time a church can build their organitation by choose between association and foundation, because the purpose of that legal entities is to protect the activities of religious. Thus church is a legal entity, known legal entity is a subject of law which have rights and obligations that must be strewn with. Church have rights to hold religious activities, and for that religious activities can be hold a church need a place. The goverment must be protect all religious activities of church as a legal entituy, by created a regulation which can give a strong punishment to all people who violate the rights of church as a legal entity, so the churh can fulfill their rights.

Keynotes : The Certainty of Legal Entity, Church, Fulfilment of the Rights

DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian.....	i
Pengesahan Pembimbing.....	ii
Persetujuan Panitia Sidang Ujian.....	iii
Pernyataan Telah Mengikuti Sidanng.....	iv
Persetujuan Revisi.....	v
Abstrak.....	vi
Abstract.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar isi.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Pnelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II: INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM	
A. Pengertian Negara Hukum.....	28
1. Teori Negara hukum.....	28
2. Ciri-ciri Negara Hukum.....	29
B. Pengertian Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum.....	35

C. Teori-teori Badan Hukum	39
D. Unsur-unsur Badan Hukum	42
E. Jenis-jenis Badan Hukum Di Indonesia	44
F. Kedudukan Badan Hukum Perkumpulan Dan Badan Hukum Yayasan Di Indonesia	47
1. Perkumpulan	47
2. Yayasan.....	49

BAB III : GEREJA SEBAGAI BADAN HUKUM DI INDONESIA

A. Sejarah Gereja Di Indonesia	54
B. Gereja Sebagai Badan Hukum	59
C. Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Kebebasan Beragama Di Indonesia.....	61
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945	61
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Penyalahgunaan Dan Penodaan Agama	64
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.....	68
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.....	69
5. Peraturan Pemerintah Yang Mengatur Kebebasan Beragama Di Indonesia	71

BAB IV : KEPASTIAN BENTUK BADAN HUKUM BAGI GEREJA-GEREJA DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PEMENUHAN HAK-HAK GEREJA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Bentuk Badan Hukum Yang Seharusnya Dimiliki Oleh Gereja-Gereja Dalam Pendiriannya	74
1. Badan Hukum Gereja	74
2. Yayasan.....	76
3. Perkumpulan	81
B. Bentuk Badan Hukum yang Dimiliki oleh Gereja-Gereja di Indonesia Dapat Menjamin Pemenuhan Hak-hak Gereja sebagai Subjek Hukum	83

BAB V : PENUTUP

A. KESIMPULAN	87
B. SARAN.....	88

DAFTAR PUSTAKA

MATRIX REVISI

CURRICULUM VITAE

